

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Berat Ringannya Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Chalmid Narbuko dan Sri Mamudji, 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Danny D. Simanjuntak, 2007, *PHK dan Pesangon Karyawan*, Jakarta, Visi Media.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- International Labour Organization, 2020, *Aturan dan Praktik Pesangon di Indonesia – UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003*, Jakarta, ILO.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Johny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia.
- Leden Marpaung, 2003, *Tindak Pidana terhadap Harta*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Loso Judijanto et al., 2024, *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

B. Artikel Jurnal

- Deny Abrahams, Bahrul Amiq, Wahyu Prawesthi, dan M. Khoidin, 2023, 'The Implementation of Material Criminal Law Against Criminal Act of Embezzlement in Office', *Journal of Court and Justice*, 2(1), hh. 66–74.
- Firdaus Diezo dan Putri Elsanah Wahida, 2022, 'Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(3), hh. 105–113.
- Franco Marcello Moningka, 2018, 'Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 7(5).
- Gunardi Lie, 2024, 'Penerapan Uang Pesangon Bagi Pekerja Tetap Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Ike Indra Agus Setyowati, 2018, 'Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak', *Media Iuris*, 1(2), h. 281.
- Lalu Beny Setiawan, 2019, 'Tinjauan Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Swasta (Studi Putusan Nomor 575/Pid.B/2015/PN Mtr)', *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Muhammad Ramdhan Hananto dan Gunardi Lie, 2024, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst)', *UNES Law Review*, 6(4), hh. 10711–10722.
- Nabiyla Risfa Izzati, 2024, 'Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), hh. 384–407.

- Rindi Putri Afifah, Didha Narin Aiza, dan Ikhsan Romansah Gawi, 2021, 'Tinjauan Yuridis Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Mengenai Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja UMKM Berdasarkan Asas Perlindungan Pekerja', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(5), hh. 400–416.
- Suci Flambonita, 2017, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan', *Simbur Cahaya*, 24(2), hh. 4397–4424.
- Sugeng Prayitno, 2024, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Terkena PHK Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023', *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 6(3), hh. 162–171.
- Sutopo Sutopo, Noenik Soekorini, Vieta Imelda Cornelis, dan Hartoyo Hartoyo, 2024, 'Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), hh. 152–157.
- Widiyanti Ratna Furi dan Budi Setiyanto, 2017, 'Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(1), hh. 23–42.
- Windi Arista, 2023, 'Pergantian Hak Pesangon Bagi Pekerja Yang Di PHK Berdasarkan Pasal 156 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 8(2).

C. Regulasi atau Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

_____, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia.

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Lembaran Negara Republik Indonesia.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 379/Pid.B/2024/PN Mre.

E. Website

Firm, S I P Law. (2024, 20 November). *Tindak pidana penggelapan*. <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. (n.d.). *Direktori putusan*. Diakses pada 20 November 2024, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Phk%22>

Viолleta, Prisca Triferna. (2024, 23 Agustus). *Kemnaker tangani 3.156 kasus perselisihan, mayoritas terkait PHK*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4282503/kemnaker-tangani-3156-kasus-perselisihan-mayoritas-terkait-phk>